

KESETARAAN GENDER DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL: ANALISIS LITERATUR REVIEW

¹ Dhepita Septiyani, ² Mari Esterilita, ³ Hastin Trustisari

Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial Universitas Binawan

Correspondence

Email: 1082211004@student.binawan.ac.id,
2mari@binawan.ac.id, 3hastin@binawan.ac.id

Submitted: 7 Juni 2024

Accepted 13 Juni 2024

Published 14 Juni 2024

Abstrak

Isu kesetaraan gender telah menjadi perhatian global dalam upaya mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan, termasuk dalam bidang pendidikan. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait, namun berbagai studi menunjukkan masih adanya kesenjangan gender di lingkungan pendidikan. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan menelaah hasil penelitian di google scholar. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa salah satu isu utama adalah rendahnya akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan, terutama di jenjang pendidikan tinggi. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain budaya dan norma sosial yang menempatkan perempuan pada peran domestik serta terbatasnya dukungan orang tua. Implementasi kebijakan membutuhkan komitmen kuat dari pemangku kepentingan serta sinergi kebijakan, program, dan partisipasi masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sesungguhnya dalam sistem pendidikan nasional.

Kata kunci: kesetaraan, gender, sistem pendidikan.

Abstract

The issue of gender equality has become a global concern in an effort to achieve equitable and sustainable development, including in the field of education. This study analyzes the implementation of gender equality policies in education in Indonesia. Although the government has issued various related policies, various studies show that there is still a gender gap in the educational environment. The method used is a literature study, by reviewing research results on google scholar. The review shows that one of the main issues is the low access and participation of women in education, especially in higher education. Influencing factors include cultural and social norms that place women in domestic roles and limited parental support. Policy implementation requires strong commitment from stakeholders as well as the synergy of policies, programs, and community participation to realize true gender equality in the national education system.

Keywords: equality, gender, education system

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak bagi semua orang dan merupakan kewajiban bagi mereka yang menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap orang tanpa adanya diskriminasi, seperti orang tua untuk anaknya, orang kaya pada masyarakat miskin, dan pemerintah terhadap setiap warga negara. Di Indonesia, permasalahan pendidikan didefinisikan dengan jelas dalam konstitusi, baik dalam pembukaan maupun pasal-pasal lainnya. Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa salah-satu tujuan bernegara adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan keadilan

sosial. Pasal 31 UUD 1945 perubahan ke 4 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan dan pemerintah wajib mendanainya serta menyediakan paling sedikit anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD (*Inayatul Ulya, 2013*). Konvensi Anti Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) pasal 10 juga mewajibkan negara-negara peserta, termasuk Indonesia untuk melakukan upaya yang tepat untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan di bidang pendidikan dan menghapus stereotip tentang peran laki-laki dan perempuan. Dimana isu kesetaraan gender telah mencapai perhatian global

dalam upaya mencapai pembangunan yang adil dan berkelanjutan, ini merupakan salah satu bagian penting dalam isu bidang pendidikan mengingat pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk pola pikir sikap, dan perilaku masyarakat.

Ketimpangan akses dan kesempatan pendidikan antara laki-laki dan perempuan dapat berdampak pada pengembangan sumber daya manusia yang tidak optimal. Di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait kesetaraan gender, termasuk dalam bidang pendidikan, hal ini tercermin dalam undang-undang sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003 yang secara tegas menyatakan pentingnya memastikan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pendidikan (*Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 2003*).

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pengarusutamaan gender, termasuk di bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menetapkan tujuan ke-5 tentang pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (*Lanham-New & Nutrition Society (Great Britain), 2018*). Selain itu, instruksi presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender (PUG) juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan termasuk di bidang pendidikan (*Kertati et al., 2022*).

Namun demikian berbagai studi menunjukkan masih adanya kesenjangan gender yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik di tingkat sekolah dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Penelitian yang digunakan oleh Wulandari dan Kristiawan (2017) di SMA negeri 1 Indralaya Utara menemukan adanya perbedaan partisipasi dan prestasi belajar antara peserta didik laki-laki dan perempuan. Sedangkan pada jurnal milik Hastin Trustisari mengenai pengorganisasian forum warga untuk membuat strategi memperkuat partisipasi perempuan dalam pelaksanaan Undang-undang desa, menekankan

pentingnya pelibatan perempuan dalam proses pembangunan di desa sesuai dengan mandat Undang-Undang Desa. Forum warga diorganisir sebagai ruang strategis untuk membangun kapasitas warga, terutama perempuan, agar terlibat aktif sebagai subjek dalam proses pembangunan di desa (*Hastin Trustisari, 2018*). Sementara itu dalam penelitian Inayatul Ulya (2013) dipaparkan data statistik (BPS) yang menunjukkan adanya kesenjangan gender dalam partisipasi pendidikan di Indonesia:

Tingkat Pendidikan	Perempuan	Laki-laki
SD	49,18%	50,82%
SMP	46,34%	53,5%
SMA	41,45%	58,55%
Perguruan Tinggi	33,60%	66,40%

Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat ketimpangan akses pendidikan bagi perempuan khususnya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif berkaitan dengan faktor pendukung, serta rekomendasi untuk memperkuat upaya mencapai kesetaraan gender dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, tinjauan literatur ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi upaya peningkatan kesetaraan gender dalam sistem pendidikan nasional.

PEMBAHASAN

1. IMPLEMENTASI

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, dengan menggunakan metode kajian literatur (Literatur Review), dimana peneliti menganalisis dan mensintesis berbagai hasil penelitian sebelumnya terkait



implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam sistem pendidikan di Indonesia. Berdasarkan sejumlah penelitian terdapat beberapa tema utama terkait implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam sistem pendidikan di Indonesia:

a. Akses dan partisipasi pendidikan

Berbagai studi menunjukkan masih adanya kesenjangan akses dan partisipasi pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Penelitian Inayatul Ulya (2013) mengenai studi kebijakan pemerintah dan aplikasinya dalam pendidikan menemukan bahwa meskipun pemerintah telah berupaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pendidikan, namun kenyataannya masih terdapat kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan, terutama pada jenjang pendidikan tinggi. Perempuan cenderung memiliki keterlibatan yang lebih rendah dalam pendidikan formal. Hal serupa juga terungkap dalam studi mengkaji implementasi kebijakan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender di bidang pendidikan di Indonesia (Haslita et al., 2021), dinyatakan bahwa pencapaian kesetaraan gender dapat ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik antara perempuan dan laki-laki sehingga mereka memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk beradaptasi dalam pembangunan.

b. Kualitas proses pembelajaran

Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa proses pembelajaran di sekolah atau perguruan tinggi masih belum sepenuhnya memperhatikan perspektif gender. Studi Winarti, Kurniawan, Rahmawati (2019) di SMA negeri 1 Cirebon menemukan bahwa materi dan metode pembelajaran cenderung bias gender dengan menetapkan laki-laki sebagai subjek yang lebih dominan titik sementara itu, Inayatul Ulya (2013) dalam penelitiannya menyebutkan konten dan materi pembelajaran di sekolah-sekolah, terutama di jenjang dasar masih menunjukkan kekentalan perbedaan gender. Materi tersebut masih merefleksikan stereotip dan peran tradisional laki-laki dan perempuan.

c. Kepemimpinan dan pengambilan keputusan

Literatur yang dikaji juga mengungkapkan adanya kesenjangan gender dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan di lembaga pendidikan. Penelitian (Wulandari dan Kristiawan, 2017) menemukan bahwa proporsi perempuan dan jabatan struktural masih rendah dibanding laki-laki titik situasi serupa juga teridentifikasi pada tingkat sekolah di mana jumlah kepala sekolah perempuan masih jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Sementara dalam penelitiannya yang dilakukan Inayatul Ulya (2013) menuliskan terdapat kecenderungan pemilihan jurusan yang tidak proporsional antara laki-laki dan perempuan. Perempuan cenderung memilih jurusan yang stereotipik feminim, sementara laki-laki cenderung memilih jurusan stereotip maskulin.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan akses dan partisipasi pendidikan antara lain:

- (1) Norma dan stereotip gender yang masih kuat di masyarakat
- (2) Keterbatasan ekonomi keluarga yang cenderung memprioritaskan pendidikan laki-laki; serta
- (3) Kurangnya dukungan dan motivasi orang tua terhadap anak perempuan untuk melanjutkan pendidikan (Wulandari dan Kristiawan, 2017).

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas proses pembelajaran, antara lain:

- (1) pemahaman dan komitmen para pemangku kebijakan
- (2) ketersediaan anggaran dan sumber daya
- (3) koordinasi dan kerjasama lintas sektor; serta
- (4) pengarusutamaan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di lembaga pendidikan antara lain

- (1) budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat
- (2) pola sosialisasi gender yang berjalan secara turun-menurun; serta
- (3) keterbatasan pemahaman dan komitmen berbagai pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesetaraan gender.

3. HASIL

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan dalam jurnal ini, terdapat beberapa faktor utama yang mempengaruhi implementasi kebijakan kesetaraan gender di sektor pendidikan, serta hasil yang telah dicapai. Salah satu faktor yang masih menjadi tantangan adalah adanya stereotip dan subordinasi peran serta kedudukan perempuan dalam masyarakat yang masih didominasi oleh laki-laki. Pandangan bahwa perempuan seringkali ter subordinasi dan tidak memiliki otonomi serta setara. Anggapan bahwa pendidikan bagi perempuan hanyalah sekedar “barang mewah”, bukan kebutuhan mendasar, juga masih melekat dalam mindset sebagian masyarakat.

Namun, upaya mengatasi tantangan tersebut terus dilakukan melalui implementasi berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan, serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini dengan jelas menyatakan, mengapa perempuan mempunyai hak yang sama atas pendidikan dengan laki-laki (*Sumar, n.d.*).

Dampak positif dari implementasi kebijakan kesetaraan gender dalam sistem pendidikan di Indonesia dapat terlihat dari berbagai indikator. Pertama, jumlah siswa laki-laki dan perempuan di dalam sistem pendidikan

nasional telah seimbang, menunjukkan bahwa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin telah berkurang. Kedua, terbukanya kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasan masing-masing, tanpa ada pembatasan.

Meskipun masih terdapat tantangan terkait stereotip dan mindset masyarakat, namun upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam sistem pendidikan di Indonesia telah mewujudkan hasil yang positif. Jaminan hukum melalui berbagai undang-undang dan peraturan, serta peningkatan kesetaraan akses dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam pendidikan, menjadi bukti nyata kemajuan yang telah dicapai.

PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan utama yaitu rendahnya akses dan partisipasi perempuan, terutama dalam jenjang pendidikan tinggi. Hal ini dipengaruhi pandangan bahwa pendidikan bagi perempuan hanyalah “barang mewah”, bukan kebutuhan dasar. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan terkait implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan. Diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah dan lembaga pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif.

Selain itu, upaya perubahan mindset yang patriarki di tingkat akar rumput juga menjadi kunci penting. Diperlukan sinergi antara kebijakan, program, dan partisipasi aktif masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan gender dalam sistem pendidikan nasional. Hanya dengan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan, tantangan-tantangan ini dapat diatasi secara bertahap. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa meskipun telah ada kemajuan,

implementasi kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan Indonesia masih membutuhkan perhatian dan kerja keras dari berbagai pemangku kepentingan. Komitmen, sinergi, dan perubahan mindset menjadi faktor-faktor kunci yang harus terus didorong untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sesungguhnya dalam sistem pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Haslita, R., Samin, R., Kurnianingsih, F., Okparizan, O., Subiyakto, R., Elyta, R., Anggraini, R., Muhazinar, M., & Ardiansya, A. (2021). Implementasi Kebijakan pada Kesetaraan Gender dalam Bidang Pendidikan. *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 81–86. <https://doi.org/10.31629/takzimjpm.v1i1.3845>
- Hastin Trustisari, O. (2018). *PENGGORGANISASIAN FORUM WARGA SEBAGAI STRATEGI MEMPERKUAT PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DESA* (Vol. 5, Issue 1).
- Inayatul Ulya. (2013). *PENDIDIKAN BERBASIS KESETARAAN GENDER: Studi Kebijakan Pemerintah dan Aplikasinya dalam Pendidikan* (Vol. 4).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta:Kemendikbud.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2000). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender. Jakarta: Kemen PPPA.
- Kertati, I., Ji Pawiyatan luhur Bendan Duwur Semarang, S., & Tengah, J. (2022). IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN TUJUH PRASYARAT PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DI DAERAH. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 1–7.
- Lanham-New, S. (Susan), & Nutrition Society (Great Britain). (2018). *Sport and exercise nutrition*.
- Sumar, W. T. (n.d.). *IMPLEMENTASI KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG PENDIDIKAN*.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- Winarti, E., Kurniawan, R., & Rahmawati, Y. (2019). Analisis Bias Gender dalam Pembelajaran Fisika di SMA Negeri 1 Cirebon. *Jurnal Penelitian Pembelajaran Fisika*, 10(1), 67-72.
- Yeni Wulandaridan, M. K. (2017). STRATEGI SEKOLAH DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI SISWA DENGAN MEMAKSIMALKAN PERAN ORANG TUA. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*.